



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA

Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310

Email: kemenkopangan@kemenkopangan.go.id

Nomor : S-124/HM.02/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (Dua) berkas
Perihal : Undangan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)
Pangan Akuatik bagi Ketahanan Pangan Nasional
wilayah SUMAPAPUA

11 September 2026

Yth.

Daftar Undangan Terlampir

di –

Tempat

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pangan terkait sinkronisasi dan koordinasi penguatan ketahanan pangan, khususnya pada sektor sumber daya maritim, Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim direncanakan akan melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) dengan Pangan Akuatik dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional di wilayah SUMAPAPUA (Sulawesi, Maluku, Papua). Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 17 September 2026

waktu : 08.00 WITA – Selesai

tempat : Courtyard by Marriott Manado

Jl. A.A. Maramis, Kayuwatu, Kairagi Dua, Kec. Mapanget, Kota
Manado, Sulawesi Utara.

Mengingat pentingnya agenda tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir tepat waktu. Konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan melalui Sdr. Cheris Agung (+62 822-1797-1589) atau Sdr. Lydia Eka (+62 856-9736-1065). Adapun panitia hanya menanggung paket fullday meeting untuk 1 (satu) orang sesuai daftar undangan terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Maritim,


Dandy Satria Iswara

Tembusan Yth.:

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan (sebagai laporan).

Lampiran I

Nomor : S-124/HM.02/2026

Tanggal : 11 September 2026

RUNDOWN KEGIATAN

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pangan Akuatik bagi Ketahanan Pangan Nasional

Manado, 17 September 2026

Waktu (WITA)	Kegiatan	Ket.
08.00 – 09.00	Registrasi Peserta	
09.00 – 09.10	Laporan oleh Sesdep Sumber Daya Maritim	
09.10 – 09.20	Pembukaan oleh Deputy Sumber Daya Maritim	
09.20 – 09.45	Paparan oleh : Badan Pangan Nasional <i>"paparan FSVA 2026 dan wilayah prioritas kerentanan pangan"</i>	Badan Pangan Nasional
09.45 – 12.00	Tanggapan dan pemutakhiran kondisi wilayah SUMAPAPUA / Sulawesi, Maluku, Papua (provinsi, kota/ kabupaten daerah fokus)	Pemerintah daerah terkait
12.00 – 13.15	ISHOMA	
13.30 – 15.30	FGD: validasi data, identifikasi akar masalah, dan kebutuhan intervensi	Moderator dan seluruh peserta
15.30 – 16.00	Perumusan kesimpulan, kesepakatan tindak lanjut, dan penutup	Pimpinan Rapat

***jadwal dapat berubah sewaktu-waktu harap menghubungi narahubung**

Lampiran II

Nomor : S-124/HM.02/2026

Tanggal : 11 September 2026

DAFTAR UNDANGAN

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pangan Akuatik bagi Ketahanan Pangan Nasional

Kementerian Koordinator Bidang Pangan

1. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
2. Kepala Biro Manajemen Kinerja Data dan Informasi;

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

3. Asisten Deputi Pertanian, Pangan, dan Gizi;
4. Asisten Deputi kelautan, perikanan, dan kehutanan;

Kementerian Kelautan dan Perikanan

5. Kepala Biro Perencanaan;
6. Sekretaris Direktorat Jendral Pengelolaan Kelautan;

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Republik Indonesia

7. Direktur Pangan dan Pertanian;
8. Direktur Kelautan dan Perikanan;

Badan Pangan Nasional

9. Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan;

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara

10. Sekretaris Daerah Provinsi;
11. Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi;
12. Dinas Pangan Daerah Provinsi;
13. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
14. Badan Pusat Statistik Provinsi;
15. Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Manado;

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

16. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi;
17. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

18. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi;
19. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
20. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
21. Pemerintah Kabupaten Muna;

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat

- 22. Dinas Pangan Provinsi;
- 23. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;

Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo

- 24. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi;
- 25. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku

- 26. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi;
- 27. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
- 28. Pemerintah Kabupaten Aru;
- 29. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- 30. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
- 31. Pemerintah Kota Tual;

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara

- 32. Dinas Pangan Provinsi;
- 33. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
- 34. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;

Pemerintah Daerah Provinsi Papua

- 35. Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi;
- 36. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
- 37. Pemerintah Kabupaten Sarmi;
- 38. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
- 39. Pemerintah Kabupaten Siori;
- 40. Pemerintah Kabupaten Waropen;

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah

- 41. Dinas Pertanian, Pangan, dan Peternakan Provinsi;
- 42. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
- 43. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan

- 44. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi;
- 45. Pemerintah Kabupaten Asmat;

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat

- 46. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi;
- 47. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
- 48. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;
- 49. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni;
- 50. Pemerintah Kabupaten Fakfak;

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya

- 51. Dinas Pangan Provinsi;
- 52. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
- 53. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
- 54. Pemerintah Kabupaten Sorong;

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pegunungan

- 55. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi;
- 56. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
- 57. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Graha Mandiri, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310
Email: kemenkopangan@kemenkopangan.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA

**RAKORNIS PANGAN AKUATIK BAGI KETAHANAN PANGAN NASIONAL
Manado, 17 September 2026**

I. Latar Belakang

Pencapaian ketahanan pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan menuntut adanya sinergi kebijakan struktural antara sektor pangan dengan sektor kelautan dan perikanan. Pangan akuatik menempati posisi krusial dalam ekosistem pangan nasional yang perlu dioptimalkan secara komprehensif. Optimalisasi ini mencakup peningkatan produksi perikanan tangkap dan budi daya, efisiensi rantai pasok, eskalasi hilirisasi, serta diversifikasi produk. Lebih jauh, penguatan akses masyarakat terhadap pangan akuatik yang aman, bergizi, bermutu, dan terjangkau harus terus didorong.

Pangan akuatik memiliki posisi strategis sebagai sumber protein hewani, zat gizi mikro, diversifikasi pangan, sekaligus basis ekonomi masyarakat pesisir, pembudidaya ikan, nelayan, pengolah hasil perikanan, dan masyarakat di sekitar perairan umum daratan. Hasil analisis awal terhadap FSVA Nasional Tahun 2026 menunjukkan bahwa masih terdapat kabupaten/kota yang mempunyai nilai Indeks Ketahanan Pangan relatif rendah. Sebagian kabupaten tersebut justru berada pada wilayah pesisir, kepulauan atau wilayah yang mempunyai sumber daya perikanan tangkap dan budidaya yang relatif besar.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya fenomena: ***“tingginya sumber daya perikanan belum selalu berbanding lurus dengan tingginya ketahanan pangan masyarakat.”*** Dengan demikian, persoalan pangan akuatik nasional tidak cukup dijawab melalui peningkatan produksi semata, tetapi perlu dihubungkan secara utuh melalui: **sumber daya → produksi → logistik → distribusi → harga → konsumsi → kualitas gizi → ketahanan pangan.**

Seluruh program tersebut menuntut adanya perumusan langkah yang sistematis dan terukur, khususnya dalam menyongsong implementasi **Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2027**. Pencapaian target optimalisasi pangan akuatik menuju ketahanan pangan di tahun 2027 membutuhkan landasan perencanaan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang matang serta keselarasan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kebutuhan ini menjadikan proses sosialisasi, identifikasi, dan sinkronisasi agenda PKPN 2027, yang turut difasilitasi oleh Kementerian PPN/BAPPENAS, sebagai agenda krusial agar seluruh pemangku kepentingan memiliki visi dan arah gerak yang sama.

**RAKORNIS PANGAN AKUATIK
BAGI KETAHANAN PANGAN NASIONAL**
Kerangka Integrasi Kebijakan Lingkup Kedeputan Sumber Daya Maritim

A. Maksud
Dalam rangka percepatan pencapaian target kinerja yang telah dijanjikan melalui KONSIDAL kebijakan Pangan Akuatik untuk Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), SETDEP akan menyelenggarakan RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) PANGAN AKUATIK BAGI KETAHANAN PANGAN NASIONAL sebagai Kerangka Integrasi Kebijakan Lingkup Kedeputan Sumber Daya Maritim.

B. Tujuan
RAKORNIS bertujuan untuk:
1. Melakukan validasi data terkait volume dan jenis produksi perikanan tangkap dan budidaya;
2. Mengidentifikasi kesenjangan antara produksi dengan konsumsi lokal;
3. Mengidentifikasi distribusi, harga, cold chain, dan keamanan pangan;
4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas pangan;
5. Mengembangkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

C. Pembagian Wilayah FGD
FGD akan dilaksanakan berdasarkan pembagian wilayah sebagai berikut:

D. Pertanyaan Utama FGD
FGD membahas aspek sebagai berikut:
1. Bagaimana produksi perikanan tangkap dan budidaya?
2. Bagaimana distribusi perikanan tangkap dan budidaya?
3. Bagaimana aksesibilitas perikanan tangkap dan budidaya?
4. Bagaimana keamanan pangan perikanan tangkap dan budidaya?
5. Bagaimana rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat?

E. Output FGD
Output FGD diharapkan sebagai berikut:

PANGAN AKUATIK UNTUK KETAHANAN PANGAN NASIONAL
Indonesia | 081000-1234 | 0810000-5678

II. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Dalam rangka percepatan pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan melalui KONSIDAL kebijakan Pangan Akuatik untuk Peningkatan Indeks Ketahanan Pangan (IKP), SETDEP akan menyelenggarakan RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) PANGAN AKUATIK BAGI KETAHANAN PANGAN NASIONAL sebagai Kerangka Integrasi Kebijakan Lingkup Kedeputan Sumber Daya Maritim.

RAKORNIS dimaksudkan sebagai forum koordinasi, validasi data dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam rangka mengoptimalkan potensi pangan akuatik untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat pada daerah rentan pangan.

Fokus utama dalam kegiatan ini adalah membahas paradoks kelimpahan sumber daya – kerentanan pangan, yaitu kondisi daerah dengan sumber daya perikanan yang besar tetapi tingkat ketahanan pangan Masyarakat masih rendah. Pembahasan diarahkan untuk menemukan titik putus antara produksi dan konsumsi lokal serta merumuskan intervensi yang dapat meningkatkan akses, keterjangkauan, mutu konsumsi, dan hasil pembangunan pangan.

B. Tujuan

1. Melakukan validasi data terkait volume dan jenis produksi perikanan tangkap dan budidaya;
2. Mengidentifikasi kesenjangan antara produksi dengan konsumsi lokal;
3. Mengidentifikasi distribusi, harga, cold chain, dan keamanan pangan;

4. Menyelaraskan kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan pangan akuatik.
5. Menghimpun data, informasi, dan masukan sebagai bahan penyusunan kebijakan berbasis bukti.
6. Merumuskan rekomendasi dan tindak lanjut kebijakan dalam rangka optimalisasi pangan akuatik menuju ketahanan pangan 2027.

III. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Penelaahan komprehensif terkait kondisi aktual dan capaian ketahanan pangan serta korelasinya dengan ketersediaan pangan akuatik, meliputi:
 - a) ketersediaan dan produktivitas perikanan tangkap dan budi daya;
 - b) proposi produksi yang dikonsumsi masyarakat lokal dan tujuan pemasaran surplus;
 - c) distribusi, transportasi, harga, rantai dingin, pengolahan, dan keamanan pangan.
2. Pemetaan menyeluruh atas potensi sumber daya dan permasalahan yang membayangi pengembangan sektor pangan akuatik utamanya keterkaitan dengan IKP, PPH, PoU, kemiskinan, stunting, dan pola konsumsi protein;
3. Evaluasi kontribusi riil subsektor perikanan tangkap serta perikanan budi daya terhadap pilar ketahanan pangan nasional, seperti fungsi KNMP dan infrastruktur perikanan sebagai hub pangan lokal serta integrasi hasil produksi perikanan dengan MBG;
4. Sinkronisasi kebijakan dan program pemerintah pusat dan daerah terkait pangan akuatik.
5. Identifikasi kebutuhan data dan informasi pendukung penyusunan kebijakan.
6. Perumusan rancangan rekomendasi kebijakan strategis beserta matriks rencana tindak lanjut pelaksanaannya.

IV. Fokus Pembahasan Utama

1. Berapa volume dan jenis produksi ikan per kabupaten/ kota?
2. Berapa bagian produksi yang dikonsumsi oleh masyarakat lokal?
3. Kemana surplus hasil perikanan dipasarkan?
4. Mengapa daerah penghasil ikan masih mempunyai PoU, stunting, atau IKP yang rendah?
5. Apakah sarana rantai dingin dan transportasi tersedia dan berfungsi memadai?
6. Apakah KNMP dan infrastruktur terkait telah dan/atau dapat berfungsi sebagai hub pangan lokal?
7. Apakah hasil produksi dapat diintegrasikan dengan MBG?
8. Program dan intervensi apa yang paling efektif untuk meningkatkan IKP?

V. Data Output yang diharapkan

Rakornis ini diharapkan dapat menghasilkan data sebagai berikut:

1. Data produksi tangkap dan budidaya;
2. Produksi ikan per kapita;
3. Data Konsumsi ikan;
4. Komoditas unggulan;
5. Kondisi cold chain;
6. Peta program KKP;

7. Matriks masalah dan intervensi;
8. Pembagian peran K/L dan pemerintah daerah;
9. Target outcome.

VI. Cakupan Wilayah dan Fokus Rakornis

Rakornis difokuskan pada wilayah IV yang mencakup Sulawesi, Maluku, dan Papua. Kandidat kabupaten/ kota prioritas bersifat awal dan akan disempurnakan berdasarkan hasil validasi data FSVA, data produksi-konsumsi, serta kesiapan intervensi, meliputi:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| - Kepulauan Aru; | - Teluk Bintuni; |
| - Kepulauan Tanimbar; | - Fakfak; |
| - Maluku Tenggara; | - Sarmi; |
| - Kota Tual; | - Biak Numfor; |
| - Kepulauan Sula; | - Supiori; |
| - Banggai Laut; | - Waropen; |
| - Konawe Kepulauan; | - Asmat; dan |
| - Muna; | - wilayah lain |
| - Raja Ampat; | berdasarkan hasil |
| - Sorong; | validasi. |
| - Teluk Wondama; | |

VII. Waktu dan Bentuk Kegiatan

Hari/tgl : Kamis, 17 September 2026
 Waktu : 08.00 WITA s.d. selesai
 Bentuk kegiatan : Rapat Koordinasi Teknis (luring dan daring)
 Keterangan : **luring** diperuntukan bagi instansi pusat serta daerah fokus, **daring** diperuntukan bagi instansi provinsi di sekitarnya diluar daerah fokus.

VIII. Peserta Kegiatan Rakornis

Kementerian Koordinator Bidang Pangan

1. Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;
2. Asisten Deputy Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
3. Asisten Deputy Pengelolaan Perikanan Tangkap;
4. Asisten Deputy Pengembangan Perikanan Budidaya;
5. Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Maritim;
6. Asisten Deputy Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan;
7. Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
8. Kepala Biro Manajemen Kinerja Data dan Informasi;
9. Staf fungsional madya, muda, pertama dan pelaksana lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim;

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

10. Asisten Deputy Pertanian, Pangan, dan Gizi;

Kementerian Kelautan dan Perikanan

11. Biro Perencanaan;
12. Sekretaris Direktorat Jendral Kelautan dan Perikanan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Republik Indonesia

13. Direktur Pangan dan Pertanian;
14. Direktur Kelautan dan Perikanan;

Badan Pangan Nasional

15. Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan;

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara

16. Sekretaris Daerah Provinsi;
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi;
18. Dinas Pangan Daerah Provinsi;
19. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
20. Badan Pusat Statistik Provinsi;

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

21. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi;
22. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

23. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi;
24. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
25. Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
26. Pemerintah Kabupaten Muna;

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

27. Dinas Pangan Provinsi;
28. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
29. Pemerintah Kabupaten Banggai Laut;

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat

30. Dinas Pangan Provinsi;
31. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;

Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo

32. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi;
33. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku

34. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi;
35. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;
36. Pemerintah Kabupaten Aru;
37. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
38. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;

39. Pemerintah Kota Tual;

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara

40. Dinas Pangan Provinsi;

41. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;

42. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;

Pemerintah Daerah Provinsi Papua

43. Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi;

44. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;

45. Pemerintah Kabupaten Sarmi;

46. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;

47. Pemerintah Kabupaten Siori;

48. Pemerintah Kabupaten Waropen;

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tengah

49. Dinas Pertanian, Pangan dan Peternakan Provinsi;

50. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;

51. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Selatan

52. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi;

53. Pemerintah Kabupaten Asmat;

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat

54. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi;

55. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;

56. Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;

57. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni;

58. Pemerintah Kabupaten Fakfak;

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya

59. Dinas Pangan Provinsi;

60. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;

61. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;

62. Pemerintah Kabupaten Sorong;

Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pegunungan

63. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi;

64. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;

65. Pemangku kepentingan terkait lainnya.

Pemerintah Kabupaten/ Kota seluruh wilayah SUMAPAPUA (*diundang secara daring*)

IX. Rundown Kegiatan (tentative)

Waktu (WITA)	Kegiatan	Ket.
08.00 – 09.00	Registrasi Peserta	
09.00 – 09.10	Laporan oleh Sesdep Sumber Daya Maritim	
09.10 – 09.20	Pembukaan oleh Deputi Sumber Daya Maritim	
09.20 – 09.45	Paparan oleh : Badan Pangan Nasional <i>"paparan FSVA 2026 dan wilayah prioritas kerentanan pangan"</i>	Badan Pangan Nasional
09.45 – 12.00	Tanggapan dan pemutakhiran kondisi wilayah SUMAPAPUA / Sulawesi, Maluku, Papua (provinsi, kota/ kabupaten daerah fokus)	Pemerintah daerah terkait
12.00 – 13.15	ISHOMA	
13.30 – 15.30	FGD: validasi data, identifikasi akar masalah, dan kebutuhan intervensi	Moderator dan seluruh peserta
15.30 – 16.00	Perumusan kesimpulan, kesepakatan tindak lanjut, dan penutup	Pimpinan Rapat